

## Kegusaran Ketua MK

**K**etua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. mestinya bersikap lebih bijak dalam menghadapi opini tentang adanya praktek suap di institusinya. Sudah tepat ia menanggapi masalah ini dengan membentuk tim investigasi. Tapi jangan sampai langkah ini sekadar demi menunjukkan bahwa dugaan itu tak terbukti atau bertujuan menghukum si penulis opini.

Opini yang membuat gusar itu ditulis oleh Refly Harun dan dimuat di sebuah harian pada akhir Oktober lalu. Bertajuk "MK Masih Bersih?", tulisan itu memaparkan indikasi adanya suap buat hakim konstitusi. Mantan staf ahli hakim Mahkamah Konstitusi ini mengaku pernah mendengar langsung bahwa di Papua ada orang yang mengeluhkan sengketa pemilihan kepala daerah. "Ada yang menghabiskan miliaran rupiah untuk MK," tulis Refly mengutip orang itu.

Tersengat tulisan itu, Mahfud kemudian meminta penulis membuktikannya. Ia menunjuk Refly sebagai ketua tim investigasi buat menyelidiki dugaan suap di MK. Tim yang beranggotakan empat orang ini diberi waktu sebulan. Jika penulis tidak bisa membuktikan dugaan itu, Ketua MK berencana melaporkannya ke polisi dengan tuduhan mencemarkan nama baik.

Ancaman itulah yang perlu disesalkan. Ketua MK dan para hakim konstitusi mestinya tak perlu bersikap reaktif terhadap opini yang ditulis di media massa. Ketidaksetujuan terhadap suatu opini mestinya dibalas dengan opini tandingan. Biarlah pembaca yang menjadi hakim terakhir siapa sesungguhnya yang memiliki data dan fakta yang benar. Adu data dan argumen lewat tulisan justru akan lebih memiliki efek yang bagus bagi pemberantasan korupsi.

MK sebenarnya bisa langsung membentuk tim independen untuk menyelidiki dugaan itu tanpa harus membebani tugas ini kepada penulis opini. Institusi ini juga bisa mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki secara diam-diam sinyalemen itu. Cara ini akan lebih efektif karena KPK mempunyai kemampuan dan wewenang menyadap, hal yang tak dimiliki tim investigasi.

Refly jelas tak punya kewajiban membuktikan dugaan itu secara hukum. Ia hanya berkewajiban memberikan kesaksian dan data yang mungkin ia miliki untuk membantu penyelidikan. Tapi, karena penulis telah bersedia menyambut tantangan itu, sikap ini mesti dianggap sebagai bonus.

Apa pun hasil penelusuran tim investigasi tidak bisa dijadikan dasar untuk menjerat penulis dengan tuduhan mencemarkan nama baik. Sekalipun investigasi itu tidak menemukan bukti yang kuat bahwa telah terjadi praktek makelar kasus di MK, institusi ini tidak perlu melaporkan Refly ke polisi karena tulisannya.

Menjerat seorang penulis opini dengan tuduhan mencemarkan nama baik justru mencederai kebebasan berpendapat, yang dijamin konstitusi. MK seharusnya justru mengoreksi delik semacam ini karena cenderung disalahgunakan untuk membungkam kritik masyarakat sekaligus melindungi korupsi. ●

## KUTIPAN

### "Semuanya menerima suap dari Gayus."

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal **Iskandar Hasan**, kemarin, mengakui Gayus Tambunan keluar penjara karena menyuap.

### "Jangan sampai Amerika Serikat bingung buang sampah, dan kita siap menerima."

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat **Mahfudz Siddik**, di Jakarta kemarin, menanggapi tawaran hibah 24 pesawat F-16 bekas dari Amerika Serikat.

# Gayus Keluar Tahanan Saban Pekan

"Kami khawatir ada kekuatan besar yang melindungi dia."

**JAKARTA** — Dalam lima bulan terakhir, terdakwa kasus mafia pajak Gayus H. Tambunan terbiasa meninggalkan sel sempit di Rumah Tahanan Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok. "Tiap pekan dia keluar," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Iskandar Hasan di kantornya kemarin.

Badan Reserse Kriminal Polri menemukan indikasi bahwa Gayus hanya menghuni tahanan ketika dia hendak dibawa ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selebihnya, Gayus diduga bisa keluyuran sesu-

ka hati. "Ada indikasi ke situ," ujar Iskandar.

Menurut Iskandar, dalam kasus ini, Kepala Rutan Komisaris Iwan Siswanto-lah yang berinisiatif menawari Gayus untuk bisa keluar sel. "Kompol yang punya inisiatif sehingga terjadi kasus ini," kata Iskandar. "Tidak ada perintah atau pengaruh orang lain."

Polisi resmi menahan Gayus sejak April lalu, setelah dia sempat kabur ke Singapura. Bekas pegawai Pajak golongan III-A ini kembali menjadi terdakwa dalam kasus penyuaian terhadap polisi, jaksa, dan hakim yang menanganinya dia dalam kasus rekening mencurigakan berisi uang Rp 28 miliar pada 2009.

Pekan lalu, Gayus tidak berada di selnya ketika Ke-

pala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Tahanan Brimob. Polisi, yang sempat kehilangan jejak, akhirnya menjemput Gayus di rumahnya di kawasan Kelapa Gading.

Jumat lalu, sebelum kabar raibnya Gayus tersiar kepada publik, seorang pria berwajah mirip Gayus tertangkap kamera sedang menonton pertandingan tenis Commonwealth di Nusa Dua, Bali. Bedanya, saat itu, si pria seperti mengenakan wig.

Kepada pengacaranya, Adnan Buyung Nasution, Gayus membantah telah jalan-jalan ke Bali. Dia hanya mengaku telah meminta izin keluar tahanan untuk berobat. Tapi majelis hakim kasus Gayus di Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan membantah jika dikatakan telah memberi izin keluar tahanan bagi Gayus.

Kemarin penyidik Bareskrim Polri memeriksa istri Gayus, Milana Anggraini. Masuk sejak pukul 10.00 WIB, Milana baru keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 20.20 tadi malam. Kecuali membenarkan dia telah diperiksa, Milana menolak semua pertanyaan wartawan.

Sejauh ini Markas Besar Polri telah mencopot serta menahan Iwan Siswanto dan lima anak buahnya. Tapi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung menilai pemecatan para penjaga tahanan itu saja tidak cukup. "Kami khawatir ada kekuatan besar yang melindungi Gayus," kata politikus PDI Perjuangan itu kemarin.

● DIANING SARI | FEBRIYAN

IMAM SUKAMTO (TEMPO)



## Peluncuran Buku

Ketua BPK Hadi Poernomo (paling kiri), Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua MK Mahfud Md., dan Ketua DPR Marzuki Alie saat menghadiri peluncuran buku *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945* di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin.

## "Bilangin Suamimu, Jangan Seperti Gayus"

**N**ama dan wajah suami boleh kondang ke seantero negeri, tapi tak semua orang tahu tampang Milana Anggraini, istri Gayus Halomoan Tambunan. Milana bahkan pernah diberi nasihat agar meminta suaminya tak berlaku seperti Gayus.

Jupan Tampubolon, Camat Kelapa Gading, adalah orang yang memberikan nasihat itu. Empat bulan lalu, dia menekan surat permohonan Milana, yang ingin pindah kerja di kantor kecamatan.

Menurut Jupan, Milana datang langsung mengantar permohonan kepindahannya di kantor Kecamatan Kelapa Gading. "Dia ingin dekat dengan rumahnya,"

ujarnya.

Semula Jupan mengaku tak mengetahui bahwa Milana adalah istri Gayus, terdakwa kasus penggelapan pajak. Saat mewawancarai Milana,

saat itu kami sedang membutuhkan tambahan staf," ujarnya.



Milana Anggraini

Jupan hanya ingin mengetahui latar belakang dirinya. "Milana mengaku bahwa dirinya tinggal di Kelapa Gading. Milana juga mengaku sebagai istri seorang staf di Kementerian Keuangan," tuturnya.

Dalam surat permohonan pindah itu, Milana melampirkan keterangan kondite kerja yang baik dan ijazah dari Universitas Indonesia dengan IPK 3,4. "Kebetulan

saat itu kami sedang membutuhkan tambahan staf," ujarnya.

Seusai wawancara, Jupan sempat mengantar Milana ke pintu keluar sambil membuka obrolan. "Bilangin sama suami kamu, kalau kerja di Kementerian Keuangan, jangan seperti Gayus!" kata Jupan.

Namun jawaban Milana tak terduga. "Maaf, Pak, suami saya Gayus," ujar Milana seperti ditirukan Jupan. Jawaban Milana sonak membuat Jupan terpepranjat. "Maaf, saya tidak bermaksud menyindir. Tapi Anda siap mental kan bekerja di sini," kata Jupan.

"Siap, Pak, itu sudah risiko saya," kata Jupan mengutip ucapan Milana.

Milana—yang biasa dipanggil Rani—adalah pegawai golongan III-B dengan besar tunjangan kepegawaian daerah Rp 3,3 juta dan gaji pegawai negeri Rp 2,2 juta per bulan. Di tempat kerjanya sebagai staf Kepala Subbagian Persidangan Pimpinan dan Panitia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, Milana dituding kerap mangkir dari kerjanya. Y. Sofyan S.Z., Kepala Subbagian Persidangan Pimpinan dan Panitia Sekretaris DPRD, pernah memberikan teguran tertulis pada 10 November 2010.

● RIKY FERDIANTO | RENNY FITRIA SARI  
NUR HARYANTO | FEBRIYAN